

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI ACEH
Yoyon Safrianto

Universitas Teuku Umar

Abstrak

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih cepat, karena daerah itu sendiri mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sehingga daerah diharapkan menjadi kekuatan pendorong dalam pertumbuhan ekonomi, untuk masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di provinsi Aceh, bagaimana pengaruh besar dari desentralisasi fiskal pada ekonomi pertumbuhan di Province. Untuk tujuan menentukan perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh dan untuk menentukan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi. Metode penelitian ini menggunakan waktu analisis data series. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder di tingkat makro dari instansi terkait seperti Bappeda Aceh, Biro Pusat Statistik (BPS) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pertumbuhan ekonomi di Aceh sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal adalah 0,129% (persen) sehingga dianjurkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dianggap penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi (PDRB), DBH (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini memberikan kewenangan kepada daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Bagian yang menjadi urusan Pemerintah Pusat hanya meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yuridis, Moneter dan Fiskal, serta Agama.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan (DAPER) hanya sebesar Rp. 81,1 triliun, dan meningkat sebesar 16,8 persen ditahun 2002 menjadi Rp. 94,7 triliun. Tahun 2006 Dana Perimbangan mencapai Rp. 222,2 triliun atau meningkat sebesar 55,2 persen dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2008, besarnya dana perimbangan telah mencapai Rp. 278,7 triliun (BPS, 2009).

Desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang benar akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa pemerintah

daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah efektifitas pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan mengalokasikan dana tersebut pada sektor-sektor atau pos-pos yang penting atau yang membutuhkan dalam meningkatkan pembangunan, apakah sudah mencapai sasaran atau belum.

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal sering kali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan peminat desentralisasi.

Dari fenomena diatas penulis sangat tertarik meneliti sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Oleh karena itu judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”**

PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh.
2. Berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai wahana pendidikan politik di daerah, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan, sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995), dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998:311), yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Bahn dan Linn (1992:274), berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh dua argument sebagai berikut. Pertama, *median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiscal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Besarnya dana bagi hasil dari pajak maupun sumber daya alam ditetapkan berdasarkan persentase tertentu.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 21). DAU dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai Undang-undang.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Syarifin dan Jubaedah (2005:107) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah

1. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Wijaya (2007:112) menambahkan kriteria pengalokasian DAK, yaitu:
 - a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
 - c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan di suatu negara pada dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini dilaksanakan harus merata sehingga tidak terjadinya ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan biasanya dititikberatkan pada bidang ekonomi. Pembangunan adalah sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro, 2002:19).

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dilihat dari DBH, DAU, dan DAK di Provinsi Aceh sebagai variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebagai variabel terikat.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas Keuangan Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan variabel DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2000-2012.

Metode Analisis

Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal menggunakan uji t dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Nilai hitung. } t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Dimana :

- n_1 = Periode data pertumbuhan ekonomi sebelum adanya desentralisasi
 n_2 = Periode data pertumbuhan ekonomi setelah adanya desentralisasi
 x_1 = Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum adanya desentralisasi
 x_2 = Rata-rata pertumbuhan ekonomi setelah adanya desentralisasi
 t = t_{hitung}
 S_p = Estimasi variasi gabungan

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, persamaan regresi linier berganda tersebut secara matematis diformulasikan (Gujarati, 2009, 188)::

$$\text{Ln } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDBH} + \beta_2 \text{LnDAU} + \beta_3 \text{LnDAK} + \beta_4 D$$

- Dimana:
- Y = Variabel tidak bebas
 - X = Variabel bebas
 - α = Intersep
 - β = Koefisien estimasi
 - μ = Error term

Kemudian model tersebut diformulasikan ke dalam bentuk Ln dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\text{Ln PE} = \alpha + \beta_1 \text{LnDBH} + \beta_2 \text{LnDAU} + \beta_3 \text{LnDAK} + \beta_4 D + \varepsilon$$

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan ekonomi
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- D = Dummy Variabel
- 1 = sebelum desentralisasi
- 0 = sesudah desentralisasi
- ε = Error (variabel pengganggu)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh digunakan Uji Beda rata-rata. Pengujian ini dilakukan terhadap pengujian dua sampel yang berpasangan. Pengujian hipotesis akan dilakukan pada tingkat konfident interval 95 % atau tingkat significans $\alpha = 0,05$ atau dengan $n = 50$, adapun hipotesis nya sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh.

Ha : Terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut diperoleh nilai signifikan = 0,000, karena nilai signifikan = 0,000 < Alpha = 0,05, maka menolak H0, artinya Terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diterapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh.

Berdasarkan pengujian multikolinieritas untuk ketiga variabel bebas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai toleran lebih besar dari 0,10 untuk ketiga variabel bebas tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinearitas. Analisis hasil output diperoleh nilai Prob. Chi-square (X^2) = 0,4663 yang lebih besar dari nilai alpha = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Dari hasil analisa output diperoleh nilai probabilitas t statistic untuk variable DBH, DAU, DAK dan D1 secara berturut-turut adalah 0.3707, 0.4359, 0.1472 dan 0.4180 semua nilai tersebut lebih besar dari nilai taraf nyata (alpha) 0.05, sehingga tidak ada dari variable tersebut yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebelum dan sesudah terjadinya desentralisasi fiskal sebagai berikut:

$$\text{Ln PE} = 3.200 - 0.0149 \text{ LnDBH} - 0.00859 \text{ LnDAU} + 0.5227 \text{ LnDAK} + 0.0149 \text{ D}$$

1. Dapat kita jabarkan bahwa nilai Konstanta sebesar 3,20 artinya apabila dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dianggap konstan maka besarnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 3,20 persen
2. Koefisien regresi untuk dana bagi hasil diperoleh sebesar 0,0149 artinya setiap kenaikan sebesar 1 persen yang terjadi pada variabel dana bagi hasil maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,0149 persen saat desentralisasi, dengan asumsi variabel dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dianggap tetap.
3. Koefisien regresi untuk dana alokasi umum diperoleh sebesar 0,0086 artinya setiap kenaikan sebesar 1 persen yang terjadi pada variabel dana alokasi umum maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,0086 persen, dengan asumsi variabel dana alokasi khusus dan dana bagi hasil dianggap tetap.
4. Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Khusus diperoleh sebesar 0,523 artinya setiap kenaikan sebesar 1 persen yang terjadi pada variabel dana alokasi khusus maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 0,523 persen, dengan asumsi variabel dana bagi hasil dan dana alokasi umum dianggap tetap.
5. Nilai dummy sebesar 0,0149 memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh meningkat sebesar 0,0149 terjadi saat diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Dari hasil penelitian diatas, ternyata variabel dana alokasi khusus yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan yaitu :

1. Hasil Regresi dengan menggunakan dummy menunjukkan bahwa Diperoleh nilai R^2 (R Square) = 0,9933 memiliki arti bahwa 99.33 persen variasi naik turunnya Pertumbuhan Ekonomi dapat dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan krisis ekonomi sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Konstanta sebesar 1,162 artinya apabila dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dianggap konstan maka besarnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 1,162 persen.

2. Dana Alokasi Umum dan Krisis Ekonomi berturut-turut adalah 0,2130 dan 0,1780, kedua nilai tersebut $>$ nilai $\alpha = 0,05$. Artinya secara individu variabel Dana alokasi umum dan variabel dummy krisis ekonomi tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil diperoleh nilai probabilitas t-statistik secara berturut-turut 0,000 dan 0,0061, kedua nilai tersebut $<$ nilai $\alpha = 0,05$, Artinya secara individu variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

SARAN

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pengembangan potensi wilayah dan dana bagi hasil (DBH) untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana dan prasarana publik karena kedua variabel ini memberi pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
2. Alokasi investasi juga harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pembentukan PDRB daerahnya yang berujung pada peningkatan PDRB per kapita. Sehubungan dengan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mempercepat proses konvergensi PDRB per kapita di Provinsi Aceh, yaitu dengan pola pertumbuhan yang tidak seimbang pada besarnya alokasi investasi untuk meningkatkan PDRB per kapita sehingga kebijakan dari desentralisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat di bandingkan dengan kebijakan sentralisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, **Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2006-2012**, Jakarta – Indonesia.
- Gujarati, Damodar N, (2009), **Basic Econometrics**, McGraw-Hill Education (Asia)
- Kuncoro, Mudrajat. (2004), **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Jakarta: Erlangga.
- Oates, W. E., (1993), **Fiscal Decentralization and Economic Development**, National Tax Journal, LXVI (2):237-43.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Pusat Statistik, **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006 – 2010**, Jakarta – Indonesia.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, **Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus**.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang **Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010**
- , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 **Tentang Otonomi Khusus Aceh**.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**

- ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
- ,Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Sukirno, Sadono (2004), **Makro Ekonomi Teori Pengantar**, Edisi ke tiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2008, **Grand Design**, Jakarta: Desentralisasi Fiskal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Todaro, Michael P (2002), **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Jilid I, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga.
- Wijaya (2007). **Kebijakan Fiskal Dalam Suatu Negara**. PT. Gia, Indonesia